

General Overview

Entri FHNRW 1-15 April adalah 22 entri berita. Berita kesehatan dengan jumlah entri 5, antara lain keluarga pasien keluhkan pelayanan di BPJS, ruang rehabilitasi medik kurang fasilitas. Berita pangan dan gizi berjumlah 9 entri, diantaranya petani empat desa gagal panen, hama ulat serang ratusan hektare padi di Kupang, dan musim panen NTT tak impor jagung. Berita risiko dengan 4 entri, diantaranya longsor di Ngalumere (Ende) hambat aktivitas ekonomi, dan tembok penahan gelombang pantura rubuh. Berita tentang air dengan 5 entri, diantaranya warga Tanggo dan Wejangkalo (Manggarai Timur) kesulitan air, dan sumur bor pilihan saat krisis air.

Isu Terseleksi	16-31 Mar	1-15 April
Kesehatan (Health)	12	5
Pangan & Gizi (Food & Nutrition)	9	9
Risiko (Risk)	11	4
Air (Water)	2	5
Total	34	22

IRGSC NTT Research focus adalah publikasi reguler yang berisikan ringkasan penelitian tentang NTT yang mutakhir yang dikombinasikan dengan berita dari tiga media harian utama di NTT yakni Pos Kupang, Timor Express dan Victory News. Fokus dari NTT Research Focus adalah pada isu kesehatan, pangan, nutrisi, risiko, dan air. Terkait rangkuman berita di bawah ini, diharapkan agar pembaca melakukan validasi dari kliping berita yang dimaksudkan [Lihat juga keterangan penerbitan di halaman 15].

Contents

KESEHATAN	2
1. Keluarga Pasien Keluhkan Pelayanan di BPJS	2
2. Ruang Rehabilitasi Medik Kurang Fasilitas.....	3
3. Puskesmas Reformasi Belum Maksimal.....	4
4. Tinggi Kematian Bayi di Belu.....	4
5. RSJ Naimata Belum Penuhi Syarat, NTT Urutan Kelima Prevalensi Gangguan Mental	5
PANGAN & NUTRISI.....	6
1. Petani Empat Desa Gagal Panen.....	6

2.	Hama Ulat Serang Ratusan Hektare Padi di Kupang.....	6
3.	Musim Panen, NTT Tak Impor Jagung.....	7
4.	Warga Palue Terancam Kelaparan.....	7
5.	Kangkung Itu Tinggal Kenangan.....	8
6.	Petani Wulandoni Gagal Panen.....	9
7.	Anggaran Rp 10 Juta Petani Terima Bibit 30 Kg.....	9
8.	Pasien RSUD Johannes Keluhkan Makanan yang Disajikan.....	10
9.	Kepala Instalasi Gizi tak Terima Keluhan Pasien.....	10
	RISK.....	11
1.	Longsor di Ngalumere Hambat Aktivitas.....	11
2.	Tembok Penahan Gelombang Pantura Rubuh.....	11
3.	Jalan ke Desa Pruda Rusak Berat.....	12
4.	Jembatan Wairterang Belum Diperbaiki.....	12
	AIR.....	13
1.	Warga Tanggo dan Wejangkalo Kesulitan Air.....	13
2.	Sumur Bor Pilihan Saat Krisis Air.....	14
3.	Air Untuk Minum Saja Susah.....	14
4.	Keluhkan Air Bersih.....	14
5.	Kapasitas Produksi PDAM Kota Diatas 200 Liter per Detik.....	15

KESEHATAN

1. Keluarga Pasien Keluhkan Pelayanan di BPJS

Pos Kupang: Kamis, 10 April 2014 (halaman 11)

Pelayanan di BPJS yang terletak di RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang dikeluhkan keluarga pasien rawat inap. Mereka harus antre cukup lama untuk mengurus elegabilitas pasien. Demikian diungkapkan beberapa keluarga pasien rawat inap yang ditemui di dekat kantor BPJS di RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang, Selasa (8/4). Menurut mereka, untuk mengurus elegabilitas pasien atau keabsahan pasien di rumah sakit maka harus diurus BPJS dan mereka terpaksa harus antri cukup lama. "Kami minta agar ada kebijakan dari BPJS. Kami bingung mau jaga pasien atau mau antri. Kalau hanya satu orang saja yang jaga dan dia harus antri maka akan terjadi kesulitan. Kami bisa antre sampai satu jam lebih," ujar Cictor, salah satu keluarga pasien. Menurutnya, jika pasien rawat inap tidak segera diurus elegabilitasnya dalam waktu 3X24 jam maka pasien harus membayar sebagai pasien umum bukan sebagai peserta JKN. Menurutnya, sebelumnya keluarga pasien tidak perlu antre seperti ini karena begitu datang dan lapor

maka mereka tidak perlu menunggu lama, bisa langsung kembali ke ruangan untuk melihat keluarga yang sementara dirawat. Menurutnya, kalau pasien rawat jalan yang antri BPJS maka tidak terlalu bermasalah. Selain itu juga, keluarga pasien lainnya meminta agar pihak rumah sakit membuka jalan dari kelas tiga laki-laki dan bedah menuju ke kantor BPJS sehingga mereka tidak perlu jalan putar. “Sekarang ini kalau mau ke kantor BPJS maka kami harus putar karena ada pagar. Nah kalau hujan maka kami harus berlindung dulu di belakang IGD baru berlari-lari ke kantor BPJS,” jelasnya.

2. Ruang Rehabilitasi Medik Kurang Fasilitas

Timor Express: Selasa, 15 April 2014 (halaman 11)

Ruang rehabilitasi medik RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang, kekurangan fasilitas atau alat untuk perawatan pasien. Akibatnya, untuk melatih pasien berbicara tidak dapat dilakukan. Perawat maupun dokter dalam merawat pasien hanya dengan cara manual. Hal ini disampaikan salah seorang perawat di ruang rehabilitasi medik, RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang, Heribertus saat ditemui Timor Express, Rabu (9/4). Menurutnya, dalam melakukan fisioterapi pasien, perawat harus didukung dengan sejumlah peralatan. Yang terjadi selama ini, kata dia, perawat dalam melakukan fisioterapi terutama pasien latih bicara, hanya secara manual, dan tidak ada peralatan yang disiapkan manajemen rumah sakit. Disebutkan, untuk meningkatkan pelayanan, selain penyediaan alat fisioterapi, harusnya perawat umum ditugaskanbelajarkan, agar kinerja bisa meningkat terutama dalam memberikan pelayanan maksimal kepada pasien. Kenyataannya, hal itu jarang dilakukan, sehingga pelayanan kadang terkendala SDM. Untuk petugas di ruangan rehabilitasi sebutnya, lebih banyak perawat umum, dibandingkan dengan tenaga fisioterapi tamatan diploma tiga (D3). Sedangkan tenaga dokter, rumah sakit sudah menyediakan dokter fisioterapi, dalam memberikan pelayanan kepada pasien. “Untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien, tidak cukup dengan peralatan yang memadai, tapi harus menyiapkan tenaga yang handal dan terdidik,” sebutnya. Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang, Mina Sukarsi yang ditemui Timor Express, Jumat (11/4) di kantornya mengatakan, ketika membutuhkan peralatan medis, setiap dokter yang bertugas di ruang perawatan, harus mengajukan permohonan untuk pengadaan peralatan yang dibutuhkan. Dirinya tidak tahu alat terapi berbicara itu apa, karena dokter di ruang rehabilitasi medis tidak pernah mengajukan permohonan untuk pengadaan alat terapi berbicara. Pada dasarnya, manajemen RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang, sangat siap untuk menerima semua masukan dari setiap poli dan bangsal, untuk pengadaan alat-alat yang dibutuhkan. Wadir pelayanan itu mengaku, dana RSUD Kupang masih sangat terbatas, tetapi apabila diajukan sesuai kebutuhan pasien, pihak manajemen akan mengadakan satu per satu, sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit.

3. Puskesmas Reformasi Belum Maksimal

Victory News: Selasa, 1 April 2014 (halaman 8)

Program Puskesmas Reformasi yang menjadi salah satu program unggulan Wali Kota Kupang Jonas Salean, sehingga mendapat apresiasi nasional dianggap belum maksimal dan harus ditingkatkan secara bertahap untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Pasalnya, masih banyak persoalan kesehatan yang dialami warga Kota Kupang. Hal ini disampaikan anggota DPRD Kota Kupang Niko Frans kepada VN, Senin (31/3). Niko mengatakan, program peningkatan pelayanan prima di tingkat puskesmas sudah dimulai dari tahun 2009 dan sering dibahas di tingkat komisi DPRD Kota Kupang. Selain memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sarana dan prasarana penunjang puskesmas masih menjadi perhatian utama. “Banyak target yang bisa dicapai bila pelayanan di puskesmas berjalan baik terutama untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak saat proses persalinan berlangsung,” ujarnya. Ia berharap pemerintah dan semua stakeholders bisa memaksimalkan setiap program kerja yang mendukung Puskesmas Reformasi. DPRD Kota Kupang sangat mendukung program pemerintah terutama untuk kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat, asalkan program tersebut benar-benar dijalankan untuk kepentingan masyarakat. “Kita dukung program itu, asalkan dalam pelaksanaannya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota KUpang Ari Wijana menjelaskan, tidak mudah mengubah image puskesmas karena itu harus dilakukan secara bertahap. Menurutnya, saat ini terdapat empat Puskesmas Reformasi yakni Puskesmas Pasir Panjang, Puskesmas Bakunase, Puskesmas Sikumana, dan Puskesmas Alak. Tujuan Puskesmas Reformasi yakni meningkatkan pelayanan kesehatan dan mengubah image masyarakat terhadap puskesmas yang selama ini negative sehingga bisa lebih diterima oleh masyarakat. Puskesmas Reformasi berkaitan dengan tiga hal penting yakni perubahan pola pikir terutama standar pelayanan di puskesmas sesuai SDM yang tersedia sehingga setiap petugas bisa bertanggung jawab sesuai latar belakang keilmuan dan tupoksinya. Selain itu, setiap puskesmas juga harus meningkatkan budaya kerja di mana pelayanan kepada masyarakat bukan hanya dari sisi keilmuan semata tapi ikut berempati terhadap kondisi pasien, pelayanan yang tepat waktu dan tepat sasaran, pemberian informasi yang tepat, dan pendekatan kemanusiaan. “Manajemen puskesmas juga menjadi sorotan penting dalam program ini. Sistem manajemen mengarah pada ketepatan waktu pelayanan di setiap loket, baik di loket pendaftaran maupun arahan petugas bagi pasien yang tepat. Baik ke poli gigi, polii umum, maupun poli KIA”, ujarnya. Dia menambahkan, selain itu system pengelolaan keuangan harus bersifat transparan. Setiap uang yang masuk maupun keluar dilaporkan secara berkala, agar bisa diketahui seluruh petugas medis, dewan penyantun puskesmas, maupun oleh pasien.

4. Tinggi Kematian Bayi di Belu

Pos Kupang: Jumat, 4 April 2014 (halaman 13)

Salah satu persoalan yang menonjol di wilayah Belu sekarang ini adalah angka kematian bayi yang cukup tinggi akibat kurang gizi. Tercatat dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Belu sampai dengan April 2014 sekitar 21 bayi meninggal. Ini menjadi tantangan bagi mahasiswa Akademi Keperawatan (Akper) Belu untuk sosialisasi ke masyarakat pada kegiatan KKN yang sedang dilaksanakan. Plt Bupati Belu, Drs. Petrus Bere, MM, menyampaikan hal ini ketika melepas 115 mahasiswa calon peserta kuliah kerja nyata (KKN) Akademi Keperawatan Kabupaten Belu semester genap tahun ajaran 2013/14 di Atambua, Rabu (2/4). Petrus mengungkapkan, masyarakat di pedesaan sangat minim pengetahuan tentang apa arti dan pentingnya kesehatan. Oleh sebab itu, peran mahasiswa Akper yang melakukan KKN untuk memberikan pengertian dan penjelasan tentang tujuan KKN di desa, sehingga masyarakat bisa paham dan membantu dalam tugas. "Saya harap mahasiswa dapat mempraktekan ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah secara baik kepada masyarakat agar kemudian hari masyarakat dapat menerima dampak positifnya," jelas Djulianus, Direktur Akper Belu.

5. RSJ Naimata Belum Penuhi Syarat, NTT Urutan Kelima Prevalensi Gangguan Mental

Pos Kupang: Sabtu, 12 April 2014 (halaman 10)

Gedung Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Naimata hingga saat ini belum memenuhi syarat untuk digunakan. Agar bisa digunakan, paling tidak dibutuhkan dana Rp 70 miliar untuk melengkapi kekurangan yang ada. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dr. Stefanus Bria Seran, MPH yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (11/4). Ia dikonfirmasi mengenai kondisi kesehatan jiwa masyarakat NTT dan belum beroperasinya RSJ Naimata. Bria Seran mengatakan, membangun rumah sakit tidak gampang. Tidak hanya dua gedung dan bukan hanya bangunannya saja tetapi harus dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana, peralatan, sumber daya manusia, administrasi manajemen dan ijin mendirikan. "Bangunan yang dibutuhkan misalnya untuk ruang administrasi, ruang rawat jalan, ruang rekam medik, UGD, ruang rawat inap, ruang inap forensi, ruang tindakan, ruang rehabilitasi medik, ruang rehabilitasi mental dan sosial, ruang rawat jiwa intensif, ruang radiologi, farmasi, laboratorium, dan lainnya. Juga harus ada bangunan penunjang seperti IPAL, gudang farmasi, gudang barang, laundry, IPSRS dan lainnya," ujarnya. Menurutnya, RSJ membutuhkan biaya sekitar Rp 70 miliar dan tidak ada alokasi dana untuk RSJ. Untuk itu, katanya, sampai saat ini RSJ belum memenuhi syarat untuk menjadi sebuah rumah sakit. Dinas Kesehatan Provinsi sudah membentuk tim untuk konsultasi dengan Kemenkes dan Kemendagri RI. Data yang dihimpun Pos Kupang, untuk pembangunan RSJ ini sudah dialokasikan dana sejak tahun 2007 dan saat ini sudah ada dua bangunan yang berdiri di Kelurahan Naimata. Dana yang sudah dikucurkan untuk RSJ ini Rp 3 miliar. Bria Seran menambahkan, Provinsi NTT menempati urutan kelima tertinggi untuk prevalensi gangguan mental emosional yakni 7,8 persen. Urutan pertama Sulawesi Tengah, diikuti

Sulawesi Selatan, Jawa Barat, DIY dan NTT. Untuk nasional, katanya, sebesar 6,0 persen sedangkan NTT 7,8 persen. Menurutnya, untuk prevalensi gangguan jiwa berat sebesar 1,6 per 1.000.

PANGAN & NUTRISI

1. Petani Empat Desa Gagal Panen

Pos Kupang: Selasa, 1 April 2014 (halaman 9)

Bencana tanah longsor yang menimpa empat desa di Kecamatan Fatuleu, Fatuleu Tengah dan Kupang Timur sejak tahun 2011 lalu, menjadi penyebab gagal tanam dan gagal panen. Hal ini diungkapkan perwakilan para petani dari Desa Tolnaku, Desa Nunsaen, Desa Oelbiteno dan Desa Oelatimo, saat menghadiri pertemuan Forum Iklim Lintas Aktor (FILA) di Kantor Bappeda Kabupaten Kupang, Kamis (27/3) siang. Biasanya, petani menanam bawang merah, bawang putih, Lombok dan aneka sayuran dengan mengandalkan aliran air berlimpah dari jaringan perpipaan. Sejak bencana longsor akibat pergeseran tanah tahun 2011 hingga sekarang, pasokan air nyaris tidak ada karena sumber air tertutup tanah longsor. "Jagung dan padi lading tidak bisa dipanen. Sebab hujan badai dan longsor. Ini berlangsung sejak tahun 2011. Kami kekurangan persediaan pangan menghadapi musim paceklik musim panas tahun ini," kata Obehetan. Untuk memanfaatkan sisa bulan basah April-Juni tahun ini, petani menanam aneka sayuran dan kacang-kacangan. "Tapi sebelum kami panen kacang, rusa sudah masuk ke ladang dan 'panen' duluan. Petani mau tembak rusa, pemerintah larang karena rusa hewan yang dilindungi undang-undang," jelas Obehetan.

2. Hama Ulat Serang Ratusan Hektare Padi di Kupang

Victory News: Jumat, 11 April 2014 (halaman 9)

Hama ulat menyerang lebih dari 100 hektare tanaman padi di persawahan Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sejak dua pekan terakhir. Serangan hama mengakibatkan batang dan daun padi mejadi layu kemudian menguning lalu mati. Sejumlah petani yang dihubungi di persawahan tersebut mengatakan, hama menyerang begitu padi mulai berbuah. Petani yang terlambat mengantisipasi serangan hama tersebut dikhawatirkan gagal panen. "Ada tanaman padi yang hanya tinggal batangnya padinya saja, tetapi tidak ada isi," kata Benyamin Haba, petani di persawahan setempat, Kamis (10/4). Benyamin mengatakan, tanaman yang terkena fuso akibat serangan hama, kurang dari lima hectare. Akan tetapi areal serangan diperkirakan lebih luas lagi, mengingat luasnya areal persawahan tersebut. Serangan hama cepat meluas karena terlambat diantisipasi petani. Petani lainnya kata dia, langsung mencegah serangan hama dengan menyemprotkan pestisida dua kali seminggu," ujarnya. Benyamin yang bekerja sebagai petani penggarap, mengolah lahan

lebih dari satu hektare yang dibagi untuk lahan padi dan lahan kangkung. Untuk pengendalian hama, ia membeli tiga jenis pestisida masing-masing Rp 60.000 per botol untuk kebutuhan selama satu minggu. “Jadi selama satu minggu itu kita habiskan uang Rp 180.000 hanya untuk pengadaan pestisida,” kata dia. Dengan menyemprot dua kali seminggu kata dia, penyebaran hama bisa ditekan. Hanya saja, pengendalian hama harus dilakukan hingga tanaman menguning. Jika tidak, potensi gagal panen sangat besar.

3. Musim Panen, NTT Tak Impor Jagung

Timor Express: Jumat, 11 April 2014 (halaman 3)

Jelang musim panen yang dilakukan petani jagung, Provinsi NTT tidak akan melakukan ‘impor’ jagung dari luar NTT. Namun impor jagung tetap dibutuhkan untuk menjaga stok jagung di NTT. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, Yohanes Tay Ruba kepada Timor Express di ruang kerjanya, Kamis (10/4). Dijelaskan Yohanes, memang di satu sisi impor jagung sangat dibutuhkan, hal ini guna mengantisipasi stok jagung di NTT, dalam menunjang kebutuhan masyarakat NTT. “Memang impor tidak perlu, tapi untuk mengantisipasi persediaan dan untuk menunjang kebutuhan masyarakat, maka di satu sisi kita perlu impor, tapi untuk saat ini tidak ada impor,” tegasnya. Menyoal tren produksi jagung di NTT yang fluktuatif atau tidak stabil bahkan semakin menurun, dirinya menampik. Menurut Yohanes, hal ini dibuktikan dengan data dari tahun 2005-2007, produksi jagung hanya mencapai kurang dari 600 ribu ton, dan tahun 2007 hanya 514.335 ton saja. Namun pada tahun 2008, setelah Pemerintah Provinsi NTT bertekad menjadikan NTT sebagai provinsi jagung, meski fluktuatif namun pada tahun 2013 produksi jagung di NTT mencapai 711.278 ton. Menurut laporannya, produksi jagung tersebut terwujud, antara lain, adanya kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta swasta. Juga integrasi kawasan jagung dan ternak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan dukungan Menko Kesra di tujuh kabupaten di NTT yakni Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flores Timur dan Ngada. Untuk meningkatkan produksi jagung, lanjutnya, telah disediakan sarana dan prasarana pertanian meliputi pembukaan dan optimalisasi lahan 17.315 hektar, bantuan traktor besar 68 unit, hand tractor 306 unit, pompa air 107 unit, pemipil jagung 35 unit, pengolah jagung 37 unit, prosesing benih kapasitas 200 ton/MT di Nagekeo, resi gudang kapasitas 1000 ton di Kabupaten Kupang dan berbagai bantuan lainnya. Ditanya produksi jagung tahun 2014, Yohanes mengatakan, masih banyak petani yang belum menyelesaikan panen sehingga hasilnya belum ada.

4. Warga Palue Terancam Kelaparan

Pos Kupang: Jumat, 4 April 2014 (halaman 17)

Bukan hanya warga pengungsi yang susah. Warga Palue lainnya di delapan desa yang masih bertahan di luar zona merah di Palue juga khawatir akan mengalami kelaparan. Pasalnya, pasca banjir bandang yang melanda wilayah itu 31 Desember 2013 lalu, lahan pertanian masyarakat rusak tergerus air. “Tahun ini masyarakat saya terancam kelaparan karena gagal panen. Batu-batu besar pasca banjir bandang itu tidak bisa direlokasi warga, terpaksa mereka tanam jagung, ubi di sela-sela batu. Hasil panen tidak menjanjikan masyarakat saya. Ada delapan desa di sana,” tandas camat Palue, Fedrik Edmundantes, kepada Pos Kupang di kantor BPBD Sikka, Kamis (3/4). Terkait masalah itu, demikian Fedrik, ia telah memberikan dorongan dan semangat kepada masyarakat agar memanfaatkan semua potensi lahan yang ada untuk menanam apa saja. “Langkah yang kita ambil pertama adalah menyampaikan kondisi itu kepada dinas pertanian dan ketahanan pangan Sikka. Kedua, kita imbau masyarakat manfaatkan semua potensi lahan yang ada,” tandas Fedrik. Lahan pertanian pasca Rokatenda meletus, demikian Fedrik, seharusnya membuat lahan pertanian masyarakat subur. Tetapi pasca letusan itu juga telah terjadi banjir bandang. “Jadi kita belum melihat langsung dampak positif abu vulkanik terhadap kesuburan tanah di sana,” tandas Fedrik.

5. Kangkung Itu Tinggal Kenangan

Pos Kupang: Kamis, 10 April 2014 (halaman 10)

Namanya kelurahan Fatubesi, tapi orang lebih mengenal wilayah ini dengan sebutan Oeba. Fatubesi memang merupakan pecahan dari Kelurahan Oeba. Wilayahnya meliputi Pasar Oeba, pesisir Pantai Oeba hingga bekas kebun kangkung yang kini tinggal kenangan. Pasar Oeba, merupakan salah satu dari tiga pasar tradisional besar di Kota Kupang. Kangkung Oeba, siapa yang tidak kenal. Dengan harga yang sangat murah, kangkung Oeba bisa diperoleh semua orang. Tumbuh di atas tanah campuran dengan pasir, kangkung Oeba memiliki kualitas rasa yang berbeda. Padahal banyak daerah penghasil kangkung seperti Tarus, Noelbaki, dan Oesao. Hanya di Oeba tumbuh jenis kangkung ini, yang menurut banyak orang rasanya sangat enak. Batangnya lebih besar dan daun-daunnya lebih lebar. Bahkan kangkung ini lebih tahan cuaca panas dibandingkan dengan kangkung biasa. Itulah sebabnya, jika dimasak warnanya lebih kelihatan masih hijau segar. Sayangnya, sejak beberapa tahun terakhir, kangkung Oeba sudah tidak ada lagi. Para petani kangkung ini sudah tergusur. Katanya, kebun kangkung ini sudah menjadi milik konglomerat, dan di sana akan dibangun sebuah hotel berbintang. Lurah Fatubesi, I Wayan Astawa, yang ditemui beberapa waktu lalu, mengatakan, menata wilayah itu memang butuh kerja keras. “Sampah di Kelurahan Fatubesi memang menjadi masalah utama tetapi jangan dengan keberadaan pasar ini membuat lingkungan Fatubesi kumuh. Penanganan terus kita upayakan agar dari hari ke hari sampah semakin berkurang bukan bertambah,” kata Astawa.

6. Petani Wulandoni Gagal Panen

Victory News: Kamis, 3 April 2014 (halaman 13)

Para petani di Kecamatan Wulandoni mengalami gagal panen tahun ini karena tanaman pertanian seperti padi, jagung, dan kacang tanah tidak berproduksi. Pantauan VN, Rabu (2/4), tanaman milik warga setempat seperti jagung, padi, dan kacang tanah tampaknya mengering. Pemandangan miris itu dapat disaksikan di lahan pertanian milik warga Desa Wato Wara, Wulandoni, Pantai Harapan, Ataili, dan Desa Leworaja. Martha Tuto, warga Desa Ataili, Kecamatan Wulandoni kepada wartawan ketika berkunjung ke Pasar Wulandoni, Rabu (2/4) mengaku, hingga saat ini belum ada bantuan apapun dari pemerintah. “Kami tahun ini tidak bisa panen, semua tanaman yang kami tanam mulai dari padi, jagung, kacang tanah, sudah kering semua. Kalau keadaannya begitu, kami mau panen apa? Dengan kondisi hujan yang begini, tentu nanti tanaman lain seperti jambu mete, juga tidak berhasil,” ungkap Tuto. Ia menuturkan, Pemerintah Kabupaten Lembata melalui dinas terkait sudah melakukan identifikasi lahan pertanian yang gagal panen sejak bulan Februari 2014 lalu. “Memang kami ada cadangan makanan seperti pisang, dan ubi-ubian. Tapi itu bertahan berapa lama? Karena kalau cuacanya panas, pisang-pisangnya pasti layu. Petugas kabupaten sudah turun,” ujarnya.

7. Anggaran Rp 10 Juta Petani Terima Bibit 30 Kg

Pos Kupang: Kamis, 3 April 2014 (halaman 7)

Alokasi anggaran Rp 400 juta untuk 40 petani pemilik lahan pembukaan atau percontakan sawah, pengadaan bibit, pupuk dan obat-obatan dengan jatah tiap petani pemilik lahan Rp 10 juta di Tanaraing, Kecamatan Rindi, Sumba Timur, ternyata hanya menerima bibit padi 30 kilogram (kg) tanpa merek. Dana Rp 400 juta tersebut merupakan sebagian dari Rp 600 juta total dana untuk percontakan dan optimalisasi lahan sawah di Desa Tanaraing tahun anggaran 2013. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. Salah satu petani Tanaraing, Putra Semaun (63), warga RT 02/ RW 02, mengungkapkan itu kepada Pos Kupang di lahan yang disiapkan untuk sawah itu, Kamis (27/3). “Hingga saat ini saya belum mendapat bantuan dari Dinas Pertanian Sumba Timur. Awalnya saya dengar akan mendapat Rp 10 juta per hektar. Lahan sudah ditraktor, tapi belum ada dana untuk tanam. Saya baru terima bibit padi 30 kg,” ujarnya. Hal senada dikatakan oleh Oktavianus He (48). Warga RT 05/ RW 03, Desa Tanaraing, ia mengatakan, program percontakan sawah dan optimalisasi lahan di desa itu tidak ada hasil. “Tidak ada rapat anggota kelompok tani selama ini. Mubazir karena tidak ada hasil,” keluhnya. Sebagai seorang petani, lanjut Oktavianus, ia ingin memprotes program yang menghabiskan dana ratusan juta rupiah dan tidak tepat sasaran. Namun untuk mengajukan protes, Oktavianus mengaku tidak tahu mengadu ke mana. Hal ini karena warga yang tinggal di desa itu masih terisolasi dari akses dan layanan transportasi. “Kami sebenarnya senang

program yang dikatakan untuk peningkatan hidup petani, tapi hasilnya seperti ini,” ujarnya.

8. Pasien RSUD Johannes Keluhkan Makanan yang Disajikan

Victory News: Rabu, 22 April 2014 (halaman 15)

Makanan yang disajikan untuk pasien di RSUD WZ Johannes dikeluhkan para pasien. Makanan yang disajikan tidak terlalu diminati pasien sehingga jarang dimakan. Pasien kebanyakan makan makanan yang dibawa keluarga dari rumah. Makanan yang disajikan terlalu hambar dengan asupan gizi yang tidak mendukung proses penyembuhan pasien. Demikian dikeluhkan sejumlah pasien yang sedang dirawat di RSUD WZ Johannes kepada VN, Selasa (1/4). Theresia, orang tua pasien asal Sabu Raijua yang tengah dirawat di RSUD WZ Johannes mengatakan, asupan gizi pada makanan sangat diperlukan untuk mendukung proses penyembuhan. Namun, terkadang makanan yang disajikan kurang mengandung gizi yang seimbang untuk mendukung kesembuhan pasien. Dia mengatakan, makan yang disajikan tidak mengandung unsur gizi yang dapat membantu proses penyembuhan. Makanan juga tawar dan sudah asam sehingga tidak menggugah selera pasien. Akibatnya, banyak pasien tidak makan makanan yang disiapkan rumah sakit dan terpaksa mendatangkan makanan dari rumah. “Lauknya memang ganti-ganti, namun semuanya asam dan tawar,” kata Theresia. Hampir setiap makanan yang disajikan tidak dimakan anaknya, sehingga lebih sering dia yang memakannya. Itu pun yang dimakan lauknya saja. “Saya hanya ambil lauk telurnya saja, sementara nasi dan sayuranya tidak pernah dimakan,” terangnya. Dia berharap, manajemen rumah sakit memperhatikan menu makanan yang disajikan bagi pasien, sehingga memudahkan proses penyembuhan.

9. Kepala Instalasi Gizi tak Terima Keluhan Pasien

Victory News: Kamis, 3 Maret 2014 (halaman 15)

Kepala Instalasi Gizi RSUD WZ Johannes tak terima baik atas keluhan pasien terkait asupan gizi pada makanan yang disajikan untuk pasien di rumah sakit tersebut. Ia beralasan, makanan yang disajikan untuk pasien sudah sesuai standar kalori yang dibutuhkan pasien. Kepala Instalasi Gizi RSUD WZ Johannes Medi Beatrix kepada VN, Rabu (2/4) mengatakan, laporan yang disampaikan pasien itu tidak benar. Bahkan dia menilai informasi yang diberikan itu sengaja untuk merusak nama baiknya sebagai Kepala Instalasi Gizi RSUD WZ Johannes. Dia bahkan mendesak VN untuk membeberkan siapa yang telah memberikan informasi itu. “Siapa yang memberi tahu informasi itu. Tolong beritahu kami. Kalau tidak, kami yang dirugikan,” katanya. Dia mengakui, semua menu yang disiapkan dan diberikan kepada pasien, sudah sesuai standar dan kalori yang dibutuhkan pasien. Makanan yang disajikan sesuai standar dan kebutuhan gizi pasien. Dia bersama dua stafnya mengaku, selama ini sudah bekerja keras untuk kepentingan

pasien. “Kita sudah kerja keras sampai sore untuk mereka, lalu apalagi yang kurang,” tegasnya. Karena itu, dia berjanji akan memanggil semua kepala ruangan bagian gizi untuk mengklarifikasi masalah tersebut.

RISK

1. Longsor di Ngalumere Hambat Aktivitas

Victory News: Selasa, 1 April 2014 (halaman 13)

Longsoran batu yang berada di Ngalumere, Desa Ondorea Barat, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende telah menghambat aktivitas lalu lintas kendaraan di jalur jalan trans Flores. Longsoran batu ini sudah menutupi badan jalan yang hendak dilalui kendaraan. Demikian disampaikan Kepala Desa Ondorea Barat Rudolfus Ndate kepada VN di Nangapanda, Sabtu (29/3). Jalur ini merupakan jalur trans Flores yang menghubungkan enam kabupaten yang ada di Flores yakni Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat. Jika instansi terkait tidak melakukan pengusuran longsoran batu ini secepat mungkin maka jalur jalan ini bisa lumpuh. Dia menambahkan, longsoran batu ini sudah mendekati tiga bulan lebih. Masyarakat di Desa Ondorea Barat sudah melakukan pengusuran dengan cara gotong royong dan alat yang dimiliki sangat manual sekali. “Untuk melakukan komunikasi dengan instansi terkait di Pemkab Ende sudah saya lakukan agar segera digusur karena longsoran ini sudah memakan badan jalan, tapi komunikasi itu tidak ada realisasi secara baik. Kami berharap segera dilakukan pengusuran secepatnya longsoran batu itu,” ungkapnya.

2. Tembok Penahan Gelombang Pantura Rubuh

Pos Kupang: Jumat, 4 April 2014 (halaman 18)

Jalan trans Flores terancam putus, karena tembok penahan gelombang areal pesisir pantai utara rubuh. Akibatnya abrasi pantai menjorok ke darat dan badan jalan perlahan-lahan hancur. Pantauan Pos Kupang di lokasi pantai utara, Rabu (2/4), sebagian tembok penahan abrasi air laut sudah runtuh ke bibir pantai, sedangkan sisanya sudah retak dan terlihat miring akibat batu pondasinya terseret air laut. Akibat runtuhnya tembok penahan gelombang tersebut menghasilkan retakan-retakan pada aspal jalan raya yang diperparah lagi sewaktu gelombang kuat merembes ke badan jalan. Seorang warga sekitar pantai utara yang tak mau menyebut namanya, mengatakan, “Sudah bertahun-tahun dibiarkan seperti ini. Padahal jalan ini merupakan akses utama bagi warga seberang pantai utara. Jika dibiarkan terus bisa putus,” tegasnya. Lubang akibat kikisan air laut setiap harinya sangat dalam dan perlahan memakan badan jalan, sehingga areal jalan tersebut sangat berbahaya saat difungsikan. Lanjutnya, kalau dibiarkan terus akan memakan korban bagi yang kurang berhati-hati

karena bebatuan yang berasal dari pengikisan tersebut berhamburan ke badan jalan dan sangat berbahaya. Dia berharap ada perbaikan secepatnya.

3. Jalan ke Desa Pruda Rusak Berat

Pos Kupang: Senin, 7 April 2014 (halaman 18)

Warga Desa Pruda, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, merindukan perhatian pemerintah terkait akses jalan dari desa itu menuju Kota Maumere. Jalan menuju desa itu terbilang rusak berat hingga sulit diakses. “Kami merasa seperti tinggal di desa buangan karena warga di sini masih hidup susah. Kami sangat mengharapkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sikka,” kata Kepala Desa Pruda, Martinus Fernandes, saat ditemui Pos Kupang di kediamannya, Sabtu (5/4) siang. Ia menjelaskan, segala keterbatasan yang mereka rasakan selama ini karena perhatian pemerintah yang relatif kurang. “Bapak bisa lihat sendiri, jalan raya sepanjang 60 kilometer mulai dari cabang Talibura hingga Desa Pruda rusak berat dan tidak pernah diperbaiki,” ujar Martinus. Kondisi jalan yang buruk seperti sekarang ini menyebabkan akses masyarakat dari desa ke Kota Maumere sangat sulit. Itu berarti hasil pertanian masyarakat sangat sulit dijual di kota karena akses jalan yang tidak memadai. “Kalau kita jalan buru-buru bisa berakibat buruk karena terjatuh dan lain sebagainya. Jalan menuju Desa Pruda ibarat pembunuh yang menakutkan masyarakat. Kecelakaan yang terjadi bukan karena tabrakan tetapi terjatuh akibat jalan licin dan berbatu,” katanya. Hal senada diungkapkan masyarakat setempat, Lambertus. Ia mengharapkan agar Pemkab Sikka secepatnya menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan. Setiap kali ganti pimpinan, kondisi Desa Pruda masih tidak mengalami perubahan sama sekali. “Tidak pernah ada perubahan yang berarti di tempat ini. Semuanya serba susah. Selain jalan rusak berat, akses warga untuk mendapatkan air minum bersih pun susah. Kami seperti warga yang tinggal dalam pembuangan saja,” kesal Lambertus. Kondisi yang memprihatinkan lagi, kalau ibu hamil yang ingin melahirkan terpaksa tidak bisa dirujuk ke tempat lain karena jalan sulit. Warga terpaksa menyelesaikan masalah dengan cara menjemput bidan dari puskesmas untuk datang ke desa itu. “Sengsara sekali hidup kami di tempat ini. Kami tidak bisa mengungkapkan satu per satu karena banyak kekurangan yang ada. Warga hanya berharap agar suatu saat pemerintah memberi perhatian untuk masyarakat Desa Pruda,” harap Lambertus.

4. Jembatan Wairterang Belum Diperbaiki

Pos Kupang: Sabtu, 5 April 2014 (halaman 18)

Jembatan Wairterang di jalan trans Maumere-Larantuka yang rusak diterjang banjir awal tahun ini, hingga kini belum diperbaiki. Kondisi saat ini sangat membahayakan arus lalu lintas, terutama bis antara kota dalam provinsi dan truk-truk raksasa. Pantauan Pos Kupang, Jumat (4/4) siang, terlihat konstruksi jembatan setengah bagiannya sudah

rubuh dan badan jembatan terpaksa difungsikan oleh kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, juga sudah retak. Kondisi itu sebenarnya tak layak lagi digunakan, tapi masyarakat terpaksa menggunakan karena tidak ada alternatif. Dari sisi kiri dan kanan jembatan juga ada tumpukan batu dan tanah memadati badan jembatan yang sengaja ditimbun untuk menahan konstruksi jembatan tersebut agar tidak membahayakan. Padahal tumpukan tersebut malah membahayakan jika dibiarkan, karena sewaktu-waktu saat pengendara kurang berhati-hati, terlebih lagi pengendara yang belum menguasai areal tersebut dapat tergelincir atau menabrak tumpukan tersebut. Karolus Fitalis (43), warga Dusun Wodong, Desa Wairterang saat ditemui Pos Kupang di kediamannya, Jumat (4/4) siang, mengatakan jembatan yang terletak di desanya sudah rubuh sejak Februari lalu, namun sampai saat ini tidak ada perbaikan dari instansi terkait. Kondisi tersebut, selain menyulitkan pengendara juga warga sekitar. “Pernah Dinas PU turun satu kali, terus tidak ada yang datang lagi sampai sekarang, kasihan kalau dibiarkan terlarut, karena ini bukan jembatan penghubung desa dengan desa tetapi jembatan tersebut merupakan sarana utama sebagai penghubung jalur darat, jadi kalau dibiarkan terus begini transportasi darat pasti terganggu,” ujar Fitalis. Lanjutnya, sekitar Maret kemarin ada kecelakaan kendaraan roda dua di areal jembatan tersebut dan pengendaranya tidak selamat, karena lagi buru-buru dan tak melihat tumpukan batu dan tanah tersebut.

AIR

1. Warga Tanggo dan Wejangkalo Kesulitan Air

Pos Kupang: Senin, 7 April 2014 (halaman 22)

Pemasangan pipa air untuk jaringan air bersih menuju Kampung Tanggo dan Kampung Wejangkalo, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, yang dilakukan tahun 2009 lalu terkesan mubazir. Sampai saat ini, air yang diambil dari sumber mata air Tiwu Rumbi itu belum sampai di dua kampung tersebut. Akibatnya, warga di dua kampung tersebut kesulitan mendapatkan air bersih. Keluhan ini dikemukakan dua warga setempat, Agusta (45) dan Herti (35), ketika ditemui Pos Kupang di Kampung Wejangkalo, Kelurahan Ndora, Senin (31/3) pagi. “Pemasangan pipa tersebut dilakukan sekitar empat tahun lalu, namun sampai saat ini tidak berfungsi. Kami hanya melihat pipa dan tugu krannya saja, sedangkan air tak sedikitpun yang mengalir ke sini,” kata Agusta. Warga lainnya, Venansius Bodha (70), yang ditemui Pos Kupang secara terpisah di Kampung Tanggo, mengatakan, sejak pemasangan pipa air dan pembangunan tugu kran permanen tak terlihat sedikitpun air yang mengalir. Venansius mengatakan, air yang diambil dari mata air Tiwu Rumbi itu hanya mengalir sampai di daerah Kisol. Sedangkan ke Kampung Tanggo dan Wejangkalo tidak ada air. Hanya pipa dan krannya saja yang dipasang.

2. Sumur Bor Pilihan Saat Krisis Air

Pos Kupang: Sabtu, 5 April 2014 (halaman 22)

Bagi warga Dusun Kampung Baru, Desa Magepanda, sumur bor menjadi pilihan utama sebagai sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah krisis air di musim kemarau. Pantauan Pos Kupang di Dusun Kampung Baru, Jumat (4/4) siang, terlihat di pekarangan hingga sudut belakang rumah sumur bor yang dilengkapi dengan mesin pompa dipakai untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sebab saat ini warga tengah mengalami krisis air bersih. Robertus Rato, warga Dusun Kampung Baru, mengatakan, saat ini di kampungnya lagi kesulitan air bersih. Kebanyakan warga memilih memasang pompa di sumur bor. “Ada efek atau tidak sumur bor, tetapi kebanyakan warga di sini menggunakan sumur bor karena air di musim kemarau lagi susah. Dulunya warga mengkonsumsi air dari bendungan Liba, tapi di musim kemarau seperti ini pasti kering,” kata Rato. Dikatakannya, setiap pemasangan pompa air sumur bor dikenai biaya Rp 400ribu. Pemasangan tidak membutuhkan waktu lama. “Ada orang di kampung ini yang pasang, tinggal kita bayar. Mesin pompanya kita beli sendiri. Hanya dengan cara ini kita bisa atasi kesulitan air,” kata Rato. Warga lainnya, jacob, juga mengeluhkan hal yang sama. Menurutnya, warga yang sanggup memasang pompa air di sumur bor bisa mendapatkan air, sedangkan warga yang tidak memiliki uang hanya bisa berharap dari warga yang memiliki sumur bor tersebut. “Yang lain kita bisa usaha. Tapi kalau air tidak ada kita mau kemana?” jelasnya.

3. Air Untuk Minum Saja Susah

Pos Kupang: Kamis, 3 April 2014 (halaman 18)

“Air untuk minum saja susah apalagi untuk keperluan lainnya. Terpaksa anak-anak hanya cuci muka seadanya saat pergi ke sekolah.” Hal ini disampaikan Sebastinus Sabon, Kepala Dusun Wairbleler, Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka saat ditemui Pos Kupang di kediamannya, Senin (31/3). Ia mengeluhkan air bersih yang menurutnya sangat susah didapatkan, ditambah musim kemarau seperti saat ini terjadi kekeringan di mana-mana. “Air untuk masak kita ambil dari sumur yang letaknya tak jauh dari rumah, hanya airnya tidak tawar tetapi terpaksa kita gunakan, karena mau ambil air di mana lagi,” ujar Sabon. Lanjutnya, kesulitan air bersih ini juga dikeluhkan sebagian warga yang tidak memiliki bak penampung. “Yang punya bak penampung bisa pesan tangki, tetapi kalau tidak punya seperti saya ini hanya mengandalkan drum seadanya untuk setiap harinya isi air yang diambil dari sumur,” kata Sabon. Satu tangki 5.000 liter harga Rp 130 ribu dan hanya dipakai paling lama satu setengah bulan.

4. Keluhkan Air Bersih

Pos Kupang: Selasa, 1 April 2014 (halaman 22)

Selain gagal panen jagung, warga Dusun Doni, Desa Watumori, juga mengeluh karena tidak ada air bersih ke dusun mereka. Salah seorang warga, Bina, yang ditemui Pos Kupang, Jumat (28/3) sore, mengatakan, jumlah warga di kampung tersebut sekitar 20 kepala keluarga. "Setiap hari kami hanya mengambil air di kali Waemosu dengan jarak 5 km. Pada musim hujan kali tersebut banjir sehingga airnya kotor dan kami tidak bisa mengambilnya untuk minum. Saat musim hujan kami minum air hujan, sedangkan air dari kali tersebut hanya bisa diambil pada musim kemarau," kata Bina yang dibenarkan Yeni. Yeni dan Bina mengatakan, selama ini belum ada petugas dari dinas terkait yang datang memantau kondisi air bersih di Dusun Doni. "Kami memang belum mengusulkan kepada pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan air ini. Tapi seharusnya pemerintah desa melaporkannya karena mereka yang mengetahui keadaan kami di sini," kata Bina. Bina dan Yeni mengharapkan agar pemerintah dalam hal ini dinas teknis terkait memperhatikan air bersih di desa tersebut, khususnya di Dusun Doni.

5. Kapasitas Produksi PDAM Kota Diatas 200 Liter per Detik

Timor Express: Rabu, 2 April 2014 (halaman 10)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang, besok, Kamis (3/4) genap berusia lima tahun. Perjalanan selama lima tahun sangat menggembirakan. Pada tahun 2009 ketika PDAM Kota Kupang baru beroperasi, kapasitas produksi 90 liter per detik. Setelah berjalan lima tahun meningkat menjadi 200 liter lebih per detik. "Panjang jaringan pada tahun 2009, 20.000 meter sekarang lebih dari 90.000 meter. Baik transmisi maupun distribusi. Jumlah sambungan langsung tahun 2009 sebanyak 1.500 sambungan dan pada hari ini sudah 5.500 sambungan," ungkap Dirut PDAM Kota Kupang, Noldy Mumu kepada Timor Express di ruang kerjanya, Selasa (1/4). Dibeberkan, untuk omset tahun 2009 baru sekira Rp 900 juta per tahun. Sekarang sudah diatas Rp 4 miliar per tahun.

Tentang Penerbit

Penerbitan NTT Research Focus adalah bagian dari pengembangan NTT Studies oleh IRGSC, sebuah think tank yang berbasis di Kupang, NTT.

Koordinator pelaksana/produksi : Inriyani Takesan
Penanggung Jawab : Dominggus Elcid Li, PhD
Editor : Dr. Jonatan A. Lassa
Asisten pelaksana : Nike Frans, Randy Banunaek
Reviewer : John Talan